

# Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rumah Tanjak Riau di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru)

MAULIYANNA M. AMIN

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293

\*E-mail : Mauliyanna@gmail.com (korespondensi)

**Abstract:** This study aims to identify and describe the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at Tanjak House Riau in Pekanbaru City through side external facilitation and internal potential in business groups. This research uses organizational governance. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The methodology of this research is done by collecting data through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the Development of Small and Medium Enterprises (MSMEs) at Tanjak House Riau in Pekanbaru City consists of transparency. Transparency is a crucial thing in an organization, Participation of people and the Pekanbaru City Cooperative and MSMEs Office have responsibilities in developing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Riau Tanjak House has responsibility for the performance of employees in all sections of the Pekanbaru City Cooperative and MSMEs Office, as well as coordination in each related unit in order to improve the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). MSMEs at the Riau Tanjak House in Pekanbaru City carried out by the Department of Cooperatives and MSMEs Pekanbaru City. The factors that influence the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at Tanjak House Riau in Pekanbaru City consist of Conflicting Objectives Factors, Communication Factors, Silenced Conflict Factors, Cooperation Factors, Competition Factors, Decision-Making Factors, Response to Change factors, and effort to increase motivation, it can be done by optimizing staff performance.

**Keywords:** *Development, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Tanjak, Pekanbaru City*

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai kontribusi yang penting sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UMKM. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan dan merupakan motor penggerak pertumbuhan aktivitas ekonomi nasional.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Karakteristik utama UMKM adalah kemampuannya mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan menanggung biaya yang relatif rendah. Kehadiran UMKM bukan

saja dalam rangka peningkatan pendapatan tapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan. Hal ini bisa dimengerti karena sektor UMKM melibatkan banyak orang dengan beragam usaha.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia memiliki peranan besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2018 lalu UMKM Indonesia memiliki kontribusi hingga Rp 8.573,9 triliun ke PDB Indonesia (atas dasar harga berlaku) sedangkan PDB Indonesia pada tahun tersebut sebesar Rp 14.838,3 triliun, sehingga kontribusi UMKM mencapai 57,8% terhadap PDB. Kemudian UMKM memperkerjakan sebanyak 116.978.631 orang atau sekitar 97% dari total tenaga

kerja Indonesia (UMKM dan Unit Besar). Hingga akhir 2019, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64.194.057 unit atau 99,99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia (BPS, 2019). Di tengah perkembangan tersebut UMKM di Indonesia diuji dengan munculnya wabah virus Corona. Wabah ini pada awalnya muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan mulai menyebar ke seluruh dunia sehingga ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia WHO.

Berdasarkan Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) dampak dari penyebaran Covid-19 terhadap UMKM sangat terasa. Hampir seluruh UMKM mengalami penurunan penjualan. Sebesar 36,7% pelaku UMKM tidak memperoleh penjualan dan 26% lainnya mengalami penurunan penjualan lebih dari 60%. Sebagian besar UMKM mengalami masalah pada ketersediaan bahan baku dan pembayaran kredit (ABDSI, 2020).

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Sebagaimana Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: (a) memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan, (b) meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, (c) membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam

pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Saat ini terdapat sebanyak 15.126 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru. Data itu terhitung hingga November 2020. yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan dengan berbagai jenis usaha.

setiap tahunnya jumlah industri kecil perkecamatan mengalami peninggakan, tapi dalam fenomena di lapangan kebanyakan industri kecil ini tak banyak yang bisa bertahan lama, namun ia berganti org yang membuka industri-industri kecil ini.

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru sangat strategis dalam rangka peningkatan perekonomian. Ketangguhan UMKM telah terbukti sebagai jaringan pengaman perekonomian. Untuk itu pengembangan UMKM di Kota Pekanbaru ini perlu mendapat perhatian yang lebih serius dalam rangka peningkatan kemampuan pengusaha untuk bersaing pada pasar regional dan internasional. Sektor ekonomi kreatif berkembang pesat dan dapat di rasakan perkembangan UMKM di Kota Pekanbaru.

Perkembangan UMKM itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru yang mempunyai peran penting di bidang koperasi dan usaha mikro. Penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan.

Pada tahun 2020 di akibatkan terjadinya pandemic Covid-19 Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru terjadi banyaknya kendala seperti pegawai

pemerintah harus bekerja dari rumah akibatnya tidak memaksimalkan kinerja pegawai sehingga menjadi begitu sulit untuk membuat program dan kegiatan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi dan UMKM memiliki model atau pola pengembangan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara melaksanakan program pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu instrumen untuk menaikkan daya beli masyarakat pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Dalam upaya untuk mengembangkan potensi UMKM penulis mengambil penelitian di Rumah Tanjak Riau, karena tanjak melayu yang dipasarkan sebagai cinderamata khas melayu dari Riau yang sudah berkembang dengan sedikit inovasi baru dan sesuai dengan tanjak yang bisa dipakai oleh umum dan dipasarkan secara umum sesuai peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan tanjak sebagai souvenir unggul daerah dan dapat dikenal masyarakat luas bahwa maskotnya melayu Riau itu adalah tanjak layaknya udeng adalah khas Bali, jadi UMKM pengrajin tanjak harusnya lebih di perhatikan lagi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru.

Adanya peningkatan UMKM dapat menjadi dampak positif jika dikelola dengan baik. Namun dengan meningkatnya UMKM tersebut. Banyak UMKM yang dapat terus berkembang dan bertahan namun juga tidak sedikit UMKM yang dapat berdiri mendirikan usahanya dan karena ada beberapa permasalahan yang ada UMKM tersebut tidak dapat bertahan atau mati.

Permasalahan-permasalahan UMKM yang sering dihadapi adalah keterbatasan

modal kerja, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku, keterbatasan akses informasi mengenai informasi, kurangnya keahlian dan kualitas SDM yang tidak memadai, kemampuan teknologi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi, dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam perurusan izin usaha.

Penelitian ini memfokuskan pada masalah pengembangan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru terhadap usaha yang dilakukan Pengrajin Rumah Tanjak Riau. UMKM pada lingkup wilayah Kota Pekanbaru. Kegiatan yang ada pada Dinas ini yang penulis teliti adalah salah satu kegiatan yang berada pada sub bagian Koperasi dan Pengusaha Mikro Kecil Dan Menengah (PMKM), yang dimana didalamnya terdapat kegiatan pembinaan, pengembangan, dan kelembagaan sehingga dari kegiatan tersebut sangat membantu meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pendapatan perkapita masyarakat Kota Pekanbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Rumah Tanjak Riau melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal pada kelompok usaha maka dari itu, masalah yang diangkat penulis dalam pengembangan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap usaha pengrajin di Rumah Tanjak Riau di Kota Pekanbaru adalah terdapat pada proses berjalannya pengembangan kepada yang dilakukan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008, istilah UKM diperluas menjadi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah): Usaha Mikro merupakan sebuah usaha yang mempunyai aset (tidak termasuk tanah dan bangunan) maksimal Rp 50.000.000,- dengan omzet maksimal Rp 300.000.000,- per tahun; Usaha Kecil merupakan sebuah usaha yang mempunyai aset (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp 50.000.000,- hingga Rp 500.000.000,- dengan omzet Rp 300.000.000,- hingga Rp

2.500.000.000,- per tahun; Usaha Menengah merupakan sebuah usaha yang mempunyai aset (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp 500.000.000,- hingga Rp 10.000.000.000,- dengan omzet Rp 2.500.000.000,- hingga Rp 50.000.000.000,- per tahun.

Menurut Morrisey (Jonthan Sarwono dan K. Prihartono, 2012), strategi merupakan proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh suatu perusahaan supaya dapat tercapai segala misi. Seperti yang diketahui bahwa dalam pencapaian tujuan organisasi harus dibarengi dengan strategi dalam pencapaian tujuan.

Strategi pada umumnya perusahaan mempunyai tujuan tertentu dan untuk mencapainya memerlukan strategi. Strategi disusun untuk mengurangi kegagalan dan memaksimalkan hasil. Sedangkan menurut Chandler (Freddy Rangkuti, 2003) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

Sebagaimana dikutip oleh Husein Umar (2008), menurut Fred R. David, strategi dapat dikelompokkan atas empat kelompok strategi, yaitu: Strategi Integrasi Vertikal (*Vertical Integration Strategy*), Strategi ini menghendaki agar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, dan/atau para pesaingnya, misalnya melalui merger, akuisisi atau membuat perusahaan sendiri; Strategi Intensif (*Intensive Strategy*), Strategi ini memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk yang ada; Strategi Diversifikasi (*Diversification Strategy*), Strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk-produk baru. Strategi ini makin kurang populer, paling tidak ditinjau dari sisi tingginya tingkat kesulitan manajemen dalam mengendalikan aktivitas perusahaan yang berbeda-beda; Strategi Bertahan (*Defensive Strategy*), Strategi ini bermaksud agar perusahaan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian

yang lebih besar, yang pada ujung-ujungnya adalah kebangkrutan.

Hambatan yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil menurut dalam melakukan pengembangan usaha (Tulus Tambunan, 2002): a. Kesulitan pemasaran; b. Keterbatasan Finansial; c. Keterbatasan SDM; d. Masalah bahan baku; e. Keterbatasan teknologi.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Rumah Tanjak Riau di jalan melati indah, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru di jalan Teratai, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Data primer pada penelitian ini berasal dari wawancara pada pegawai bagian pengembangan UMKM yang ada di Dinas Koperasi Dan Ukm Kota pekanbaru dan pemilik usaha Rumah Tanjak Riau yang ada di Kecamatan tampan kota pekanbaru.

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan pada kondisi alamiah, sumber data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulannya lebih banyak dari observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan.

Observasi diteliti mengenai Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Rumah Tanjak Riau Oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat dan mencatat kejadian. Observasi bias dikatakan sebagai kegiatan yang menjadi pencatatan secara sistematis kejadian, perilaku objek

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam pengembangan asumsi serta informasi yang telah diperoleh. Maka dilakukan analisis dengan pendekatan SWOT (Strength / Kekuatan, Weakness/ kelemahan, Opportunity/ peluang, dan Threat/Ancaman).

## HASIL

### Tata Kelola Pengembangan Rumah Tanjak Riau di Kota Pekanbaru

Proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar (termasuk masyarakat lokal/adat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Memfasilitasi akses informasi merupakan hal yang terpenting untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola warisan budaya Riau. Komponen transparansi mencakup komprehensifnya informasi, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi bagi publik, dan adanya upaya untuk memastikan sampainya informasi kepada kelompok rentan. Dapat diketahui bahwa kemudahan akses dan penyediaan informasi merupakan pokok penting yang harus dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru dalam menciptakan prinsip transparansi. Pemberdayaan berbagai media informasi baik media cetak maupun media elektronik merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mempermudah penyediaan informasi.

Diketahui bahwa prinsip transparansi menciptakan kepercayaan secara timbal balik antara Dinas Koperasi dan UKM dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai mengenai pengembangan Tanjak di Kota Pekanbaru.

### Partisipasi

Proses pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder) seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Berikut ini adalah tabel program kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh dinas koperasi, bahwa program pengembang

UMKM di kota pekanbaru tidak terlepas dari unsur partisipasi masyarakat dalam pengembangan produk khas riau di kota pekanbaru, dimana partisipasi yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru belum secara maksimal. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya target yang belum terealisasi dalam pengembangan UMKM di Kota Pekanbaru.

Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang akan muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi public, proses inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

Menurut Ibu Sri Rahayu Fitri, S.STP yang merupakan seksi pengembangan usaha dan investasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, diketahui bahwa partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pengembangan tanjak, dalam hal ini mencapai target pengembangan tanjak perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah. Sehubungan dengan itu dapat dikatakan bahwa pembangunan yang sedang dalam proses ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengawasan dan penilaian dalam pengembangan tanjak di Rumah Tanjak Riau.

### Akuntabilitas

Mekanisme tanggung-gugat antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan tanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan pengembangan sektor tanjak. Di dalam

dokumen indikator pengembangan, akses kepada keadilan (access to justice) dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas. Pemerintah daerah terutama Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru memiliki tanggungjawab dalam meningkatkan pengembangan tanjak di Kota Pekanbaru.

Diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab dalam Tata Kelola Pengembangan UMKM di Kota Pekanbaru. Namun fenomena yang saat ini terlihat adalah dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru belum menyentuh keseluruhan para pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Sehingga mengakibatkan, program hanya menguntungkan para pelaku UMKM tertentu saja di kota Pekanbaru, terutama para pelaku UMKM yang memiliki kedekatan dengan orang-orang Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru.

Masalah yang seringkali terjadi dalam proses akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban bagi aparat Pemerintah masih belum sesuai yang diharapkan masyarakat pada umumnya karena instrument yang digunakan tidak jelas lingkup dan penggunaannya. Secara teoretis, akuntabilitas menyangkut tiga instrument pokok, yaitu: verifiability, responsibility, dan answerability. Dengan demikian instrument akuntabilitas ada yang menyangkut prosedur pertanggungjawaban secara internal, maupun tanggungjawaban secara eksternal dan juga cenderung bahwa konsep akuntabilitas masih cenderung menekankan pada akuntabilitas prosedur, legal dan akuntabilitas kepada pejabat terpilih (elected officials). Kurang menekankan akuntabilitas Pemerintah Daerah adalah sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun. Adapun manfaat dibuatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Dinas Koperasi dan UKM bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pekanbaru.

## **Koordinasi**

Mekanisme yang memastikan sejauh mana pihak-pihak lain (khusus institusi pemerintah) yang memiliki kepentingan terhadap sektor UMKM, memiliki kesamaan tujuan yang tercermin di dalam program kerjanya. Belum optimalnya pemanfaatan potensi lahan dan usaha budaya yang ada untuk meningkatkan hasil produksi UMKM terutama Tanjak. dapat diketahui bahwa pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan unit terkait dalam rangka peningkatan pengembangan UMKM Rumah Tanjak Riau telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, akan tetapi masih terkendala beberapa permasalahan terutama anggaran perbaikan lokasi pasar.

Diketahui bahwa kerjasama antara dinas terkait akan meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM terutama UMKM Rumah Tanjak Riau. Oleh sebab itu, maka keberadaan UMKM Tanjak di Rumah Tanjak Riau ini memberikan pengaruh positif dalam pengembangan wilayah Kota Pekanbaru. Pola koordinasi yang terjalin menempatkan kepala dinas sebagai pejabat tertinggi dimana setiap bagian-bagian organisasi terhubung dengan rantai komando langsung ke Kepala Dinas. Sementara itu pelaksana kebijakan secara teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu diserahkan kepada unit pelaksana teknik Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru.

## **PEMBAHASAN**

### **Faktor Persaingan**

Kelompok-kelompok yang saling bergantung (mereka yang saling membutuhkan untuk dapat berfungsi secara efektif) mengembangkan rasa tidak percaya, kurang koordinasi, tujuan-tujuan yang bertentangan, dan sebagainya. Pengembangan UMKM tanjak di Kota Pekanbaru merupakan salah satu sarana ekonomi untuk memerikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan Pengembangan UMKM Rumah Tanjan Riau di Kota Pekanbaru.

Persaingan dalam pemasaran hasil UMKM tanjak di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari masih terbatasnya diversifikasi produk tanjak dan sistem pemasaran yang terintegritas. Hal ini tidak sebanding dengan peningkatan hasil produksi tanjak di Kota Pekanbaru. Diversifikasi produk tanjak bertujuan untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penjualan hasil Tanjak dalam bentuk asli atau sesuai budaya aslinya.

Pengembangan UMKM Tanjak di Rumah Tanjak Riau di Kota Pekanbaru tidak terlepas dari faktor persaingan, hal ini tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif, menjaga kestabilan harga Tanjak di pasaran penting untuk dilakukan. Untuk itu kebijakan dan program kegiatan yang hingga saat ini terus digalakkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru untuk menjaga kestabilan harga Tanjak di Kota Pekanbaru. Pengawasan dalam menjaga persaingan antara pengrajin tanjak besar dengan pengrajin tanjak kecil dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Persaingan yang bersifat merusak terjadinya akibat rendahnya pengawasan dari pemerintah Kota Pekanbaru terutama Dinas Koperasi dan UKM dalam mengawasi pengembangan Rumah Tanjak Riau. Pengawasan dilakukan hanya terfokus terhadap peningkatan produksi, seharusnya pengawasan terhadap persaingan harga hendaknya mencakup dalam pembinaan para UMKM Tanjak terutama di Rumah Tanjak Riau sehingga dapat meningkatkan kinerja pengelolaan tanjak itu sendiri.

### **Faktor Pengambilan Keputusan**

Keputusan-keputusan didasarkan atas otoritas peranan atau status, bukan atas otoritas pengetahuan atau kemampuan. Pengambilan keputusan tidak dekat dengan sumber informasi. Untuk itu dalam menyelesaikan permasalahan dalam organisasi pengembangan Tanjak perlu adanya strategi dalam mewujudkan

perubahan organisasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang harus mempunyai sasaran yang jelas dan didasarkan pada suatu diagnosis yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi oleh organisasi.

Kurang tersedianya kain songket yang berkualitas dalam jumlah yang cukup. Pengadaan kain songket merupakan komponen produksi yang penting. Ketersedianya kain songket dengan kualitas yang baik sangat mempengaruhi hasil produksi tanjak. Kemampuan UMKM tanjak untuk memperoleh kain songket yang berkualitas dengan harga yang terjangkau mengakibatkan jumlah yang diperoleh tidak memadai, atau para pelaku UMKM pengrajin tanjak hanya mampu membeli kain songket dengan kualitas yang lebih rendah. Kondisi tersebut akan berpengaruh pada biaya produksi dan hasil produksi yang diperoleh oleh UMKM pengrajin tanjak terutama di Rumah Tanjak Riau pentingnya pelibatan masyarakat para pelaku UMKM Tanjak terutama Rumah Tanjak Riau dalam proses pengambilan keputusan dilakukan untuk meminimalisir intervensi dari elit-elit politik yang ada di Kota Pekanbaru dalam menentukan prioritas pengembangan UMKM Tanjak di Rumah Tanjak Riau.

### **Faktor Tanggapan Terhadap Perubahan**

Organisasi itu kaku dan menganggap sulit mengadakan perubahan untuk memenuhi perusahaan dan lingkungan sosial yang terus-menerus berubah. Perubahan-perubahan dalam organisasi dipaksakan, tidak direncanakan dengan baik, tidak ada hubungannya dengan tujuan, dan sebagainya. Tanggapan yang lamban terhadap perubahan organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, dapat diatasi dengan melakukan intensifikasi terutama dalam mengawasi, membimbing, dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan berpedoman kepada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan. Bila ditemukan tindakan atau aktifitas yang menyimpang dari standar atau petunjuk baku yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi maka dilakukan evaluasi terhadap pengembangan UMKM Rumah Tanjak Riau di Kota Pekanbaru tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD Kota Pekanbaru tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama para pelaku UMKM tanjak di Rumah Tanjak Riau Kota Pekanbaru. Dalam pengembangan UMKM Tanjak terutama Rumah Tanjak Riau perlu melibatkan stakeholders yang terkait. Proses evaluasi terhadap perubahan dalam kinerja organisasi ini penting dilakukan, karena tanpa evaluasi tidak akan diketahui sampai sejauhmana organisasi tersebut telah efektif melakukan perubahan menuju organisasi berkinerja tinggi.

### **Faktor Motivasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki motivasi yang tinggi terhadap kemajuan Tanjak. Dalam pengembangan Tanjak selain anggaran, juga sangat diperlukan motivasi kerja para pegawai untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Tanjak tersebut. Jumlah pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru masih kurang cukup untuk saat ini mengingat tugas dan fungsi yang diemban dari Dinas ini cukup besar dalam rangka memajukan UMKM di Kota Pekanbaru terutama UMKM Tanjak di Rumah Tanjak Riau. Penempatan pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru kurang sesuai dengan keahlian dan kompetensi pegawai, hal inilah yang menyebabkan kurangnya motivasi pegawai pengembangan UMKM terutama pada Tanjak di Kota Pekanbaru. Sehingga beberapa tugas yang diemban kurang berjalan secara optimal. Selain itu kurangnya

pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru juga menjadi masalah berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai. Kualitas SDM hendaknya perlu ditingkatkan terutama memberikan Reward untuk dapat lebih memotivasi pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Sumber daya lain selain SDM adalah sumber daya anggaran. Anggaran sangat penting untuk menopang keberhasilan program pengelolaan dan pengembangan tandak terutama Rumah Tanjak Riau di Kota Pekanbaru.

### **SIMPULAN**

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada Rumah Tanjak Riau di Kota Pekanbaru terdiri dari Transparansi dimana transparansi sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi, dalam Partisipasi dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru mempunyai tanggung jawab dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama pada Rumah Tanjak Riau termasuk tanggungjawab terhadap kinerja pegawai disemua bagian di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, serta Koordinasi di setiap unit terkait dalam rangka peningkatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Rumah Tanjak Riau di Kota Pekanbaru telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Rumah Tanjak Riau di Kota Pekanbaru terdiri dari Faktor Pertentangan Tujuan, Faktor Komunikasi, Faktor pertentangan yang didiamkan, Faktor kerjasama, Faktor Persaingan, Faktor Pengambilan Keputusan, Faktor Tanggapan terhadap perubahan serta dalam upaya yang meningkatkan motivasi dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan kinerja staf.



## DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Data Statistik Sektorial Kota Pekanbaru
- Eka reza khadowmi. 2019. *Implementasi kebijakan system zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru kabupaten lampung tengah*. Lampung : Universitas Negeri Lampung.
- Ekowati, Mas Roro Lili. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Mauridus Shafa. 2009. *Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang Kepada Bawahan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru*. Pekanbaru : Universitas Riau
- Meli Sukreni. 2011. *Studi Evaluasi Program Pemberdayaan Koperasi di Provinsi Riau*. Pekanbaru : Universitas Riau.
- Noni Paningsih. 2011. *Pengaruh Epektifitas Pembinaan, Pengawasan dan Sikap terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah Mita Binaan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero)*. Pekanbaru : Universitas Riau.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komutindo.
- Pasolong, Harbani 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak Dua.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau Bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pascasarjana Universitas Riau.
- Syaukani. 2002. *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Media Pustaka.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hasel Nogi. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balaiurung.
- Tangkilisan, Hasel Nogi. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Balaiurung.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zamzami. 2012. *Pengaruh kepercayaan atasan dan loyalitas kerja terhadap pemberdayaan pegawai Dinas Koperasi UMKM KOTA PEKANBARU*. Pekanbaru : Universitas Riau.